

## **BAB. IV**

### **PEMIKIRAN STRATEGI DAKWAH MUHAMMAD ANIS MATTA DALAM KONTEKS DEMOKRATISASI DI INDONESIA**

Sejarah Politik Indonesia mencatat bahwa perjuangan umat Islam dalam meng –“Islam” – kan negara telah berlangsung dalam berbagai ragam corak dan bentuk. Secara umum dapat digambarkan dua pendekatan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama, pendekatan kultural politik. Pendekatan ini diartikan sebagai tindakan keagamaan yang bermotif politik. Tindakan keagamaan bertujuan untuk menyadarkan, mencerahkan dan memberdayakan. Kedua, pendekatan struktural politik. Pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang selalu membela Islam dari dalam. Dalam pendekatan ini bahkan ada anggapan Islam yang berada di luar negara adalah Islam yang tidak lengkap. Siapapun orang Islam yang tidak mau memperjuangkan tegaknya Islam dan berbagai simbol-simbolnya akan diberi label sekuler, atau setidaknya “Islam”-nya tidak sempurna (Jurdi, 2010:104-107). Walaupun berbeda, kedua pendekatan itu sebenarnya menekankan peran penting politik dalam membangun umat, apalagi jika dikaitkan dengan demokrasi.

Dalam pemikiran strategi dakwah Muhammad Anis Matta, perjuangan melalui jalur politik juga memiliki peran yang sangat penting, tapi ia bukanlah satu-satunya jalan menuju kekuasaan umat. Yang tidak kalah penting ialah membangun basis sosial yang kuat serta mencetak kepemimpinan yang handal

(Matta, 2007:15). Ini merupakan konsekuensi dari pendekatan dakwah holistik yang ia gagas. Pendekatan ini mensyaratkan adanya gerakan sosial budaya yang berorientasi melakukan mobilisasi horizontal dengan gerakan politik praktis yang melakukan mobilisasi vertikal.

## **A. Mobilisasi Horizontal**

### **1. Membangun Basis Sosial Umat untuk Menghadapi Demokratisasi**

Sebagai sebuah isu global, kebebasan dan keterbukaan yang ditawarkan demokrasi ternyata tidak selamanya berdampak positif. Dalam hal ini komunikasi global sebagai salah satu faktor pendorong globalisasi dan gelombang demokratisasi menjadi salah satu kekuatan yang sedang berkembang dan perlu diwaspadai dewasa ini. Kehadirannya telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti politik, sains, diplomasi, pendidikan, ekonomi, budaya, militer dan sebagainya. Sayangnya, hegemoni Barat dalam komunikasi global ini cukup problematis bagi dunia Islam. Dengan adanya hegemoni tersebut, bisa dikatakan Barat telah menjadi penentu di bidang ekonomi, politik dan budaya. Sedangkan negara-negara dunia ketiga, termasuk didalamnya negara-negara Islam, sangat bergantung pada mereka (Basit, 2006:228).

Saat ini globalisasi dengan isu-isu penting yang menyertainya sudah tidak dapat dihindari oleh semua bangsa, kecuali ia sengaja mengucilkan diri serta menjauh dari berinteraksi dengan orang dan bangsa

lain. Namun harus diakui, selain membawa dampak positif terutama bagi penyebaran informasi dan teknologi, nampaknya globalisasi menjadi salah satu penyebab kondisi umat Islam yang cukup memprihatinkan. Menurut Prayitno (2002:2), secara umum kondisi di beberapa negara-negara Islam menunjukkan tercemarnya akidah kaum muslimin oleh banyak kepercayaan yang bukan dari Islam. Pendidikan umat tidak lagi berjalan sebagaimana dikendaki baik secara formal maupun informal. Pengetahuan (*tsaqafah*) di kalangan umat Islam dirasakan sangat kurang, dakwah tidak begitu berjalan, sementara yang berjalanpun kurang berkesan dalam membentuk generasi yang mencerminkan ke-Islam-an secara ideal. Sistem yang dibawa oleh Islam juga kurang bisa dikemas dengan baik dan profesional sehingga kadang menjadi bumerang untuk menghancurkan citra Islam. Puncaknya ialah akhlak umat Islam yang hampir secara keseluruhan dipengaruhi oleh tingkah laku budaya Barat.

Dalam konteks Indonesia, umat Islam di negara ini semakin tidak berdaya terhadap upaya internalisasi nilai-nilai budaya non Islami dan yang jelas bertentangan dengan kaedah-kaedah dalam syari'at Islam. Sebagai contoh; saat ini orang tua tidak mampu melarang anak gadisnya berpakaian ala artis bahkan justru malah menjadi pendorong mereka untuk melakukan itu. Padahal gaya berpakaian seperti itu jelas-jelas bukan tidak sopan lagi, tetapi sudah melanggar norma-norma Islam. Kebebasan mengintrodusir dan menginternalisir nilai-nilai budaya non Islami ternyata tidak hanya nampak pada *fashion imitation* atau peniruan gaya busana

melainkan juga terlihat jelas pada identifikasi personalnya. Dari sudut pandang teologis hal ini terkadang berdampak pada menipisnya keimanan (Rahmawati, 2013:81).

Fenomena tersebut mengisyaratkan salah satu problem globalisasi yang dialami umat Islam. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengatasi kesenjangan antara upaya mempertahankan Islam sebagai tata nilai yang diyakini kebenarannya dengan realitas kehidupan yang menuntut penyesuaian setiap saat (Rahmawati, 2013: 83). Nampaknya sudut pandang itu pula yang digunakan oleh Muhammad Anis Matta dalam melihat kondisi umat Islam di Indonesia. Menurutnya masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami masa yang sangat rumit menyangkut aspek kehidupan yang sangat dalam, yaitu transformasi nilai, budaya dan perilaku. Salah satu penyebabnya ialah proses globalisasi yang menimbulkan gesekan budaya antara Islam dan nilai-nilai lainnya. Namun sayangnya, kondisi demikian justru terjadi ketika umat Islam belum siap (Matta, 2007:51).

Baginya, dari sudut pandang kultural kesiapan yang dibutuhkan dalam rangka menghadapi globalisasi dan demokratisasi ialah umat Islam mengetahui basis identitasnya dan mengetahui dengan baik elemen-elemen yang membentuk kepribadian kolektifnya sebagai umat. Dengan demikian, ketika sudah mempunyai kekuatan dan jati diri, dengan sendirinya akan menghadirkan imunitas yang kuat ketika bergaul dan berinteraksi dengan budaya-budaya lain. Namun permasalahannya umat Islam sekarang ini

belum memiliki imunitas itu. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemahaman yang utuh tentang ajaran Islam sebagai basis identitas kaum muslimin (Matta, 2007:51).

Yang ia maksud imunitas di sini adalah kesadaran psikologis yang dimiliki seorang muslim tentang identitas ke-Islamannya yang dengan itu ia bisa memilah “mana yang harus di ambil” dan”mana yang akan diberikan” kepada umat lain. Karena umat tidak mempunyai imunitas tersebut, maka umat Islam berada pada posisi menerima tanpa syarat semua yang datang dari Barat. Padahal dengan mempunyai imunitas yang kuat, umat Islam akan berada dalam posisi yang seimbang dengan mereka. Seharusnya ada saatnya umat Islam mengetahui apa yang bisa diterima, tetapi pada saat yang sama juga harus mengetahui apa yang bisa disumbangkan. Imunitas itu bisa terjadi kalau umat Islam memahami dengan benar Islam sebagai basis. Di sinilah letak masalahnya, sekarang umat Islam terbelah kepribadiannya, tidak mempunyai jati diri (Matta, 2007:52).

Dalam pandangan Muhammad Anis Matta (2007:52-53) ada beberapa hal yang menyebabkan umat Islam kehilangan identitasnya (jati dirinya), diantaranya: Pertama, karena umat Islam jauh dari agamanya sendiri. Islam yang banyak dianut oleh masyarakat ialah Islam warisan, bukan Islam yang merupakan pilihan hidup. Kedua, para ulama yang ada dalam tubuh umat belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Bahkan tampak bahwa ulama tidak berdaya memimpin umat ini.

Dampaknya ialah umat Islam dalam menyikapi masalah politik, ekonomi misalnya, tidak dipengaruhi oleh para ulama. Akan tetapi justru banyak dipengaruhi oleh media massa. Ini berarti ulama tidak lagi memiliki kekuatan untuk memimpin umatnya, dan akhirnya umat berjalan tanpa pemimpin.

Ketiga, suksesnya kaum imperialis dalam mengangkat para pemimpin negeri-negeri Islam yang telah tersekulerkan. Realitas saat ini membuktikan hampir rata-rata negeri Islam dipimpin oleh anak bangsanya yang tersekulerkan. Sekuler yang bukan hanya jauh dari agama, tapi juga memusuhi agama. Ia mencontohkan bagaimana sikap negeri-negeri Islam terhadap invansi Amerika ke Afghanistan, rata-rata bersifat mendua. Pemerintahnya mendukung serangan. Sedangkan rakyatnya berkehendak membela saudaranya. Menurutnya, sebagai kesatuan umat Islam terbelah (*split*) antara rakyat dan pemerintahnya. Meski pemerintah terdiri dari orang-orang Islam, tapi tetap menunjukkan bahwa kendali kepemimpinannya tetap berada di tangan kaum imperialis.

Adapun yang keempat, ialah adanya usaha-usaha sistematis yang dilakukan oleh negara-negara besar untuk mendominasi seluruh negara Islam dan menyebarkan nilai-nilai kehidupan mereka kedalam kehidupan umat Islam. Namun demikian nampaknya Muhammad Anis Matta tidak memukul rata pengaruh bahwa seluruh umat Islam terpengaruh dan masuk dalam kehidupan yang hedonis. Ia melihat bahwa kehidupan yang hedonis

- yang menjadi salah satu permasalahan dakwah – lebih banyak dialami oleh sebagian masyarakat perkotaan dari kelompok menengah atas.

Saya tidak mengatakan bahwa budaya hedonis-materialis sudah berurat akar, walaupun pengaruh negatifnya sudah nampak jelas merasuki masyarakat. Kalau mau dilakukan pembagian secara objektif, sebenarnya kehidupan hedonis lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat perkotaan kelompok menengah ke atas. Mereka cenderung elitis dan hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan masyarakat (Matta, 2007:53).

Kehidupan yang hedonis menjadi terasa karena pengaruh dan tampilan serta dominasi mereka atas infrastruktur kehidupan masyarakat, seakan akan itu menjadi tren budaya yang positif. Menurut Muhammad Anis Matta hedonisme dikalangan elitis merupakan sesuatu yang tidak bisa di ubah. Hal ini berbeda dengan mayoritas umat yang tidak tersentuh peradaban Barat. Yang perlu dilakukan para ulama dan para aktifis dakwah untuk menyembuhkannya ialah dengan terlebih dahulu memilah umat Islam berdasarkan tingkatan permasalahannya (Matta, 2007:54).

Ada masyarakat yang masih dekat dengan Islam. Ada pula yang sudah parah terjangkit budaya Barat, atau sudah menjadi pendukungnya. Bahkan ada pula yang sudah menjadi pelopor sosialisasi budaya tersebut. Semua berbeda permasalahannya. Namun ada pula lapisan dari umat Islam yang tidak terkontaminasi budaya Barat, tapi tidak efektif beragama, tidak punya perlawanan. Ada yang melawan tapi tidak berdaya. Ada yang sudah mulai berdaya, tapi tidak terarah cara melawannya dan tidak sistematis. Oleh karena itu, masyarakat menjadi penting untuk di pilah-pilah (Matta, 2007:54).

Setelah memilah masyarakat berdasarkan permasalahannya, langkah berikutnya ialah mengorganisir dan mencoba memberikan pemecahannya. Yang perlu diambil terlebih dahulu ialah segmen umat yang tidak terlalu terkontaminasi kebudayaan Barat, fitrahnya masih jernih, akalunya masih sehat, kesadaran beragamanya masih tinggi.

Menurutnya di tengah masyarakat modern yang hedonis ini masih bisa ditemukan para pemuda yang tidak melakukan pelanggaran syariat, tidak berzina dan seterusnya. Namun demikian, ia juga tidak mendukung dan bekerja untuk dakwah dan kejayaan Islam. Maka dakwah bisa dimulai dari orang dengan kategori seperti ini. Untuk membangun umat, tidak bisa langsung begitu saja, tetapi harus di mulai dari individu-individu (Matta, 2007:55).

Menurut Muhammad Anis Matta, konsep yang paling baik dalam perbaikan individu ialah bekerja dengan meringkas waktu. Kalau ingin memperbaiki umat dengan perbaikan individu, maka individu yang akan diperbaiki itu setidaknya memiliki dua kualitas (Matta, 2007:55); Kualitas yang pertama adalah bahwa individu itu mempunyai fitrah untuk berubah dan kembali kepada Islam. Orang yang demikian ialah mereka yang tidak terlalu banyak terkontaminasi budaya Barat dan mempunyai harapan untuk kembali pada Islam.

Kualitas kedua hendaknya orang itu juga mempunyai bakat dan potensi dalam dirinya untuk berdakwah dan membantu orang lain. Dengan



demikian yang pertama adalah kesiapan untuk berubah, sedangkan kemampuan yang kedua ialah kemampuan untuk mengubah. Sehingga nantinya setiap orang yang berubah itu bisa menjadi agen perubahan (Matta, 2007:55).

Menurut Muhammad Anis Matta (2006:17) Ketika ideologi-ideologi besar berguguran dipenghujung abad ke-20, Islam seharusnya menjadi satu-satunya pilihan bagi umat manusia. Dalam hal ini ia setuju dengan Sayyid Quthub yang meramalkan situasi ini dan mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa “Islam adalah masa depan” atau “Masa depan di tangan Islam, dan menurutnya ramalan itu kini mulai menemukan faktanya. Nampaknya itu pulalah yang menjadi sumber “kecemasan peradaban” masyarakat Barat.

Ia mencontohkan ketika Samuel P. Huntington merekonstruksi pertarungan masa depan dunia. Konflik masa depan akan berpusat pada tema peradaban, lingkaran kecilnya bernama etnis, tapi muara besarnya bernama peradaban. Pada muara besar inilah Islam menjadi kompetitor utama budaya Barat. Itulah sebabnya Huntington meramalkan bahwa “konflik besar di masa yang akan datang ialah konflik Islam dan Barat”.

Berkaca dari apa yang di sampaikan Huntington di atas, menurutnya dakwah dalam skala peradaban menjadi isu yang sangat penting saat ini. Dan inti dari peradaban menurutnya adalah umat. Oleh

karena itu membangun umat menjadi inti dakwah itu sendiri. Dalam hal ini ia mengatakan;

“Jadi yang perlu kita bangun dalam perspektif dakwah adalah peradaban, dan inti peradaban adalah umat. Umat adalah kumpulan manusia yang berafiliasi pada ideologi dan bekerja berdasarkan ideologi itu. Dan karena itu dalam perspektif ini negara hanyalah satu instrumen peradaban, kenapa negara diperlukan? Karena tujuan negara pada dasarnya tidak lebih dan tidak bukan, yang paling utama yaitu menciptakan keteraturan (*law and order*). Menegakkan itu tujuannya. Tetapi inti dari suatu peradaban itu pada dasarnya adalah umat. Karena itulah fokus kita dalam membangun peradaban adalah membangun umat, dan umat harus lebih kuat dari *state*, karena negara hanyalah suatu instrumen organisasional untuk mengatur kehidupan kolektif kita. Tapi, inti dalam kehidupan organisasional itu adalah umat, dan karena itu rasulullah di Makah dan Madinah fokusnya adalah umat. Kenapa? Karena umat inilah yang nantinya akan bergerak kemana-mana, dan dalam banyak hal mungkin kita tidak memerlukan negara sebagai instrumen kalau umat ini kuat” (Wawancara dengan Muhammad Anis Matta 14 Desember 2014).

Dari apa yang disampaikan di atas, nampaknya bagi Muhammad Anis Matta, negara sangat diperlukan dalam dakwah sebagai salah satu instrumen untuk menopang sebuah peradaban. Negara diperlukan dalam menciptakan keteraturan dan melindungi jalannya dakwah. Namun yang terpenting baginya ialah umat. Adapun terkait pentingnya dakwah dalam skala membentuk peradaban, karena secara teologis umat Islam diperintahkan untuk berdakwah pada seluruh umat manusia.

“Kita perlu melihat, kenapa kita perlu bekerja dalam skala peradaban? Karena umat ini diciptakan untuk umat manusia secara keseluruhan, tujuan akhirnya adalah untuk satu muara besar yang namanya kemanusiaan, dimana umat ini mengalir ke sana untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Sebagai kesaksian bahwa pesan

agama sudah sampai pada mereka, *an takuunu syuhaaa 'ala naass*" (Wawancara dengan Muhammad Anis Matta 14 Desember 2014).

Namun sayangnya dalam situasi tersebut, jarak antara peluang Islam untuk menjadi ideologi dunia dan kemampuan kaum muslimin untuk merealisasikannya begitu lebar. Oleh karena itu, menurut Muhammad Anis Matta salah satu tugas dakwah dalam konteks peradaban ialah mendekatkan jarak antara Islam dan manusia muslim, jarak antara peluang dan kemampuan untuk merebutnya. Dalam hal ini ia mengungkapkan,

Tugas peradaban kita saat ini ialah mendekatkan jarak itu; jarak antara Islam dan manusia muslim. Jarak antara peluang dengan kemampuan untuk merebutnya. Manusia muslim perlu direkonstruksi ulang agar ia terbentuk sedemikian rupa menjadi "terjemahan hidup" bagi Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimanapun Islam dapat dengan mudah memenangkan pertarungan di tataran ideologi dan pemikiran, meskipun pertarungan yang sesungguhnya justru terletak diantara kenyataan; di keramaian jalan, di kegaduhan pasar, di belantara politik, di panggung budaya, di tengah desingan mesiu dan diseluruh pojok bumi. Itu adalah medan manusia. Oleh karena itu, kebenaran Islam layaknya seperti sebuah pedang tajam yang telah terhunus, dan sedang menanti tangan perkasa dari sang pahlawan (Matta, 2006:17)

Uraian Muhammad Anis Matta di atas menunjukkan dalam dakwah Islamiyah untuk memenangkan peradaban, perlu adanya upaya untuk merekonstruksi manusia muslim yang berkarakter Islami dan memiliki kemampuan untuk memperjuangkan Islam di semua lini kehidupan. Artinya peradaban itu bisa dibangun dengan terlebih dahulu membentuk pribadi muslim yang ideal yang kemudian pribadi-pribadi muslim itu bisa mengaplikasikan keIslamannya sesuai dengan lapangan kehidupan yang ia jalani.

Dalam upaya merekonstruksi manusia muslim ini Muhammad Anis Matta (2006:17-18) menawarkan tiga tahapan. Pertama, harus ada upaya memperbaharui afiliasi kaum muslimin kepada Islam kembali. Menurutnya keIslaman kaum muslimin saat ini lebih banyak dibentuk oleh warisan lingkungan sosial, bukan dari pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang Islam. KeIslaman dengan basis seperti ini membuat kaum muslimin tidak memiliki bobot sosial yang berat, tidak memiliki imunitas yang membuatnya mampu bertahan dari semua bentuk invasi budaya.

Kedua, setelah memperbaharui ke-Islam-an kaum Muslimin dengan memperbaiki pemahamannya kepada Islam, setiap individu muslim harus dibawa ke dalam komunitas muslim yang besar, dimana ia menjadi bagian dari masyarakat dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat tersebut. Apabila dalam tahapan pertama, yaitu dalam tahapan afiliasi dakwah berupaya menciptakan manusia muslim yang shalih, maka pada tahapan kedua ini manusia shalih itu dileburkan dalam masyarakat, agar ia bisa mendistribusikan keshalihannya kepada orang lain. Yang demikian dimaksudkan agar kesalehan individual itu berkembang menjadi kesalehan kolektif, dan menurutnya inilah hakikat dakwah.

Ketiga, apabila pada tahapan kedua yakni partisipasi telah sukses dan manusia muslim telah melebur dan berpartisipasi dalam masyarakatnya, menurutnya pada tahapan ketiga perlu adanya jaminan setiap orang yang berpartisipasi itu benar-benar bisa mencapai tingkat

yang paling optimal dalam memberikan kontribusinya pada Islam. Salah satu sumber kekayaan masyarakat Islam adalah keunikan-keunikan individual dari setiap manusia muslim. Menurutnya apabila potensi-potensi individual itu tertuang secara penuh dan bersinergi dalam muara Islam, maka sebuah gelombang peradaban yang dahsyat akan terjadi (Matta, 2006:18).

## **2. Mencetak Kepemimpinan Umat**

Menurut Muhammad Anis Matta, ketika menjadikan dakwah menjadi sebuah proyek peradaban, maka sesungguhnya dakwahlah yang membutuhkan kehadiran pemikir strategis. Menurutnya saat ini hampir diseluruh negara Islam, dakwah sedang dalam proses menegara. Dalam hal ini, ia setuju dengan Mark Juegernsmayer mengatakan bahwa ini merupakan kebangkitan global “nasionalisme religius” (Matta, 2010:44).

Kehadiran pemikir strategi ini sangat diperlukan. Muhammad Anis Matta memandang kehadiran para “ideolog” muslim seperti Sayyid Quthub, Muhammad Quthub, Muhammad Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qardhawi di Mesir, Al-Maududi di Pakistan dan An-Nadwi di India telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka telah membangun sebuah basis pemikiran yang kokoh bagi kebangkitan umat Islam diseluruh dunia. Menurutnya kini tiba saatnya lahir generasi baru pemikir strategis untuk menopang kebangkitan umat. Dalam hal ini ia mengatakan,

Kini tiba saatnya peran mereka dilanjutkan oleh generasi baru, generasi pemikir strategi yang bertugas menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai cita-cita dakwah. Saya tidak mengatakan generasi itu belum ada. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pustaka dunia Islam masih dipenuhi tulisan para ideolog tersebut, dibanding generasi baru yang kita harapkan (Matta, 2010:44).

Lebih lanjut Muhammad Anis Matta menyatakan bahwa dalam hal ini yang diperlukan saat ini ialah hadirnya pemikir strategi dengan kualifikasi yang baik. Adapun yang ia maksud dengan pemikir strategi ialah orang-orang yang berfikir dalam kerangka kesisteman. Mereka mampu menggabungkan banyak disiplin ilmu dan mampu meramunya menjadi sebuah pemikiran yang utuh, sekaligus mampu menjelaskan bagaimana tujuan, cara dan sarana terintegrasi menjadi satu kesatuan. Bagi Muhammad Anis Matta, strategi sendiri bukanlah ilmu, tetapi merupakan seni bagaimana memanfaatkan berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah yang menjelaskan mengapa metode itu merupakan salah satu bagian inti dari strategi (Matta, 2010:45).

Menurut Muhammad Anis Matta, para pemikir strategi beserta pemikiran-pemikiran mereka perlu diinstitusikan. Karena, ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri oleh seorang pemikir. Dalam hal ini setidaknya ada dua bidang garap yang harus dilakukan oleh kelompok pemikir strategi ini. Pertama, strategi gerakan, yaitu merumuskan strategi untuk mengembangkan dakwah dari partai menuju negara. Termasuk didalamnya merumuskan strategi pengembangan institusi, kader kepemimpinan, basis masa, pola penetrasi sosial, tahapan ekspansi, tema

dan agenda politik partai pada setiap tahapannya. Kedua, Merumuskan berbagai kebijakan publik yang sebagiannya untuk dijadikan landasan bagi penyusunan perundang-undangan dan sebagainya untuk diusulkan sebagai kebijakan pemerintah (Matta, 2010:45).

Selain itu para pemikir strategi dakwah harus mempunyai basis yang kuat pada dua lingkaran pengetahuan. Pertama, basis ilmu-ilmu ke-Islam-an. Kedua, basis ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Selama ini ada kesan para aktivis dakwah menghindari ilmu-ilmu sosial dengan alasan muatannya yang sangat sekuler. Muhammad Anis Matta tidak menafikkan hal ini, tapi itu bukan alasan untuk tidak menggelutinya. Karena itu basis ilmu-ilmu keIslaman dan pengalaman tarbiyah bukan saja akan memberikan imunitas kultural dan pemikiran, tetapi juga sebagai alat memilah dan mencipta sesuatu yang baru (Matta, 2010:46).

Dalam perjalanan dakwahnya Muhammad Anis Matta menetapkan bahwa misi dakwah yang di cita-citakan adalah untuk meraih ridha Allah SWT, caranya adalah dengan beribadah kepada-Nya. Ibadah itu berupa menerapkan dan menyemai seluruh kehendak Allah yang ia turunkan dalam bentuk syariat dalam kehidupan manusia baik sebagai individu, masyarakat dan negara. berdasarkan uraian itu maka tugas dakwah ialah membangun kehidupan berdasarkan desain Allah SWT. (Matta, 2010:7)

Biarpun demikian, Muhammad Anis Matta mengakui, menciptakan “kehidupan yang Islami” dalam kerangka pemikirannya yang luas tentu

merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan, membutuhkan waktu panjang yang melampaui umur individu bahkan kalau diukur dengan skala generasi sekalipun. Cita-cita sebesar itu juga memerlukan sumber daya manusia dalam semua lapisan masyarakat untuk semua sektor kehidupan dengan semua jenis profesi dan keahlian. Selain itu ia juga memerlukan sumber daya fisik dan dukungan finansial yang sangat besar. Lebih dari itu semua, ia juga sangat membutuhkan energi ruhiyah dan semangat jihad serta beberapa elan vital yang kompleks berupa konsep, metode, dan sistematika perjuangan yang jelas lagi mantap, gagasan dan pemikiran brilian serta inovasi yang berkesinambungan. Selain itu juga diperlukan kepemimpinan yang kuat dengan organisasi yang solid (Matta, 2010: 8).

Dengan demikian menurut Muhammad Anis Matta membangun kehidupan Islami merupakan “proyek peradaban raksasa”. Proyek besar ini bertujuan merekonstruksi pemikiran dan kepribadian muslim agar bergerak, berpikir, merasa dan bertindak sesuai kehendak Allah, atau dengan referensi Islam (Matta, 2010:8). Maka untuk melaksanakan proyek besar itu menurutnya harus dilakukan melalui empat tahapan

Pertama, membangun sebuah organisasi yang kuat dan solid sebagai kekuatan utama untuk mengoprasionalakan dakwah. Tahap inilah yang disebut sebagai mihwar tanzhimi. Menurutnya organisasi ialah tulang punggung dakwah, dan karenanya harus kuat memikul beban berat dalam waktu yang panjang. Supaya tulang punggung itu kuat, hal itu harus di isi



dengan orang-orang yang juga kuat dan juga tangguh dalam seluruh aspek kepribadian. Mereka inilah yang sesungguhnya bisa disebut sebagai pemimpin umat atau lokomotif yang akan bisa membawa gerbong panjang umat ini. Untuk mencetak pemimpin-pemimpin umat itu diperlukan proses pembinaan dan kaderisasi yang sistematis, integral dan waktu yang relatif panjang (Matta, 2006:xx).

Mereka yang dipilih untuk dikader dan dibina ialah orang-orang yang terbaik di masyarakat. Mereka memiliki bakat, intelegensia, dan kesiapan dasar untuk melakukan pekerjaan besar serta memikul amanah yang berat. Untuk itu, kaderisasi atau “tarbiyah” – sebagai mesin pencetak pemimpin-pemimpin umat – menjadi sesuatu yang mutlak (Matta, 2006: xxi).

Kedua, membangun basis sosial yang luas dan merata sebagai kekuatan pendukung dakwah. Inilah yang disebut dengan mihwar sya’bi. Kalau basis organisasi bersifat elitis eksklusif, maka basis sosial bersifat masif terbuka; kalau basis organisasi berorientasi pada kualitas maka basis sosial berorientasi kuantitas; kalau organisasi meretas jalan, maka masyarakatlah yang akan melaluinya; kalau para pemimpin melihat ke depan dengan pikiran-pikirannya yang jauh maka massa menjangkau ke depan dengan tangan-tangannya yang banyak; kalau pemimpin yang hebat mendapatkan dukungan publik yang luas maka akan terbentuk kekuatan dakwah yang dahsyat. Menurutnyalah begitulah menciptakan sinergi antara

pemimpin dan umatnya, antara kualitas dan kuantitas. Keduanya mempunyai peranan yang sama strategisnya (Matta, 2006:xxi).

Dalam konteks perekrutannya, kalau organisasi dibentuk melalui rekrutmen kader, massa dibentuk melalui opini publik; kalau kader pemimpin dibentuk melalui tarbiyah dan pengkaderan, massa dibentuk oleh media massa dan tokoh publik. Yang ingin dicapai pada tahap ini ialah terbentuknya opini publik yang Islami, struktur budaya dan adab-adab sosial yang Islami, serta dominasi figur dan tokoh Islam dalam masyarakat. Yang terpenting dan ingin dicapai pada tahapan ini ialah terbentuknya opini publik yang Islami, struktur budaya dan adab-adab sosial yang Islami, serta dominasi figur dan tokoh Islam dalam masyarakat (Matta, 2006:xxi).

Ketiga, membangun berbagai institusi untuk mewadahi pekerjaan-pekerjaan dakwah di seluruh sektor kehidupan dan seluruh segmen masyarakat. Ini disebut dengan *mihwar muasasi*. Di sini dakwah memasuki wilayah pekerjaan yang sangat luas dan rumit. Karena itu perlu pengelompokan pekerjaan, membutuhkan seluruh intitusi sosial untuk mewadahi seluruh aktifitas sosial, membutuhkan seluruh institusi ekonomi untuk mewadahi aktifitas ekonomi, membutuhkan seluruh institusi politik untuk mewadahi aktifitas politik. Selain institusi yang dibentuk, juga perlu mengisi institusi-institusi sosial, ekonomi, politik, dan militer yang sudah ada, baik yang ada di masyarakat maupun yang ada di pemerintahan (Matta, 2006:xi).

Kalau dalam basis sosial ditekankan pada penyebaran kader dakwah ke dalam masyarakat, dalam tahap institusi menekankan penyebaran kader dakwah ke berbagai institusi yang ada. Kalau dalam tahap pembentukan basis sosial ditekankan mobilisasi horisontal, maka dalam tahap ini yang ditekankan ialah mobilisasi vertikal. Menurutnya kader-kader dakwah harus mampu mengisi struktur yang tersedia di dalam lembaga-lembaga tinggi negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kader-kader dakwah juga harus mampu mengisi struktur yang tersedia di lembaga-lembaga ilmiah, ekonomi, sosial dan militer. Dengan begitu akan terbentuklah jaringan kader diseluruh institusi strategis. Menurut Muhammad Anis Matta ini merupakan pranata yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bernegara yang Islami. Maka dalam ini kalau basis massa bertujuan untuk membentuk opini publik yang Islami, basis institusi bertujuan memberikan legalitas politik terhadap opini publik itu (Matta, 2006:xii).

Keempat, setelah dakwah melalui tahapan-tahapan di atas pada tahap ini dakwah harus sampai pada tingkat institusi negara. Institusi negara dibutuhkan dakwah untuk merealisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak Allah SWT. Atas kehidupan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai mihwar daulah. Dalam hal ini, negara adalah sarana, bukan tujuan. Negara merupakan institusi terkuat dan terbesar dalam masyarakat. Dalam hal ini Muhammad Anis Matta tidak mempermasalahkan bentuk negara (apakah ia berbentuk khilafah, dinasti, atau negara bangsa) dan

sistem pemerintahan yang dicita-citakannya (apakah parlementer, presidensial, atau monarki sekalipun). Yang terpenting baginya ialah negara tersebut dapat berperan sebagai institusi penegak syariat Allah apa tidak. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa institusi negara, dalam konsep Islam, merupakan sebuah sarana untuk menegakkan peradaban. Dengan kata lain, negara bukanlah akhir, tapi justru merupakan awal dari sebuah peradaban (Matta, 2006:xii).

Bagi Muhammad Anis Matta keempat langkah dakwah di atas hendaknya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya masing-masing. Namun sayangnya ia sendiri tidak merinci secara pasti durasi waktu yang diperlukan bagi pelaksanaan masing-masing tahapan, menurutnya semuanya bisa berubah berdasarkan situasi strategis yang sedang di hadapi. Keempat tahapan itu baginya seperti rute perjalanan dakwah yang bisa berubah sewaktu waktu. Dalam hal ini ia mengatakan;

“Empat tahapan dakwah itu pendekatan dalam perspektif keumatan tadi, tapi kan nanti dalam interaksi lapangan situasinya bisa berubah-ubah. Itu seperti peta saja, rute bisa berubah-ubah tergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau cuacanya berubah, rute bisa berubah” (Wawancara dengan Muhammad Anis Matta 14 Desember 2014).

Oleh karena itu menurutnya transformasi gerakan tarbiyah menjadi partai politik bukanlah tahap akhir dari tujuan gerakan tarbiyah. Mendirikan partai hanyalah salah satu alat atau sarana atau metode dakwah. Baginya mendirikan partai politik hanyalah sebagai wadah untuk mempresentasikan dakwah ditingkat institusi. Selanjutnya anis

mengatakan bahwa gerakan ini hanyalah merupakan bahan dasar untuk merekonstruksi negara madinah. (Matta, 2006:xx).

## **B. Ekspansi Dakwah dalam Ruang Demokrasi**

Dalam rangka mensukseskan strategi dakwah melalui pendekatan politik dalam ruang demokrasi, Muhammad Anis Matta mengusulkan tiga tahapan, di antaranya ialah:

### **1. Memenangkan Wacana Publik**

Dalam dakwah melalui jalur politik memanfaatkan ruang demokrasi perlu ditanamkan pemahaman bahwa konflik dan persaingan adalah sesuatu yang wajar dan alamiah. Baik institusi maupun aktor dakwah politik dituntut untuk bisa menerima persaingan yang ada didalamnya. Yang demikian karena dalam iklim demokrasi seperti sekarang ini, persaingan telah menjadi tidak dapat dielakkan. Menghilangkan persaingan justru akan menyeret pada kondisi sistem politik yang otoriter, absolut, dan meniadakan alternatif. Itulah yang terjadi di masa Orde Baru (Firmanzah, 2008:134).

Menyikapi hal tersebut Muhammad Anis Matta (2010:36) memandang semua itu terjadi karena demokrasi merupakan sebuah sistem yang disusun untuk mewedahi heterogenitas. Dalam hal ini ia setuju dengan apa yang diungkapkan para teoretisi konflik seperti Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Lewis Coser, yang menyatakan

bahwa konflik adalah bagian yang inheren dalam kehidupan sosial politik dan itulah yang mengekspresikan heterogenitas tersebut. Konflik menjadi semakin rumit sejalan dengan tingkat kerumitan heterogenitas masyarakat. Salah satu titik perbedaan dalam masyarakat terletak pada kedalaman ide, aliran pemikiran, dan ideologi, nilai dan kepercayaan, atau semua yang mungkin kita sebut sebagai akal manusia.

Oleh karena sifat mayoritas merupakan salah satu ukuran dalam demokrasi, maka pengaruh sebuah pemikiran ditentukan oleh kemampuannya menjadi arus di masyarakat. Karena itu wacana publik menjadi salah satu institusi terpenting dalam demokrasi. Sama pentingnya dengan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Artinya wacana publik harus dimenangkan dulu sebelum memenangkan legislasi dan memenuhi lembaga eksekutif (Matta, 2010:37).

Menurut Romli (2003:28), Wacana (opini) publik bisa dimaknai sebagai pandangan orang banyak yang tidak terorganisasi, tersebar di mana-mana. Karena kesamaan pandangan terhadap sesuatu, mereka secara sadar atau tidak dapat bergerak serentak dan bersatu padu menyikapi sesuatu tersebut. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir ini berkembang opini publik bahwa syariat Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia karena rakyatnya multi etnis dan menganut beragam agama, meskipun mayoritas muslim. Maka ketika ada tuntutan untuk menerapkan syariat Islam dari beberapa organisasi Islam, banyak orang yang melakukan penentangannya bahkan dari kalangan muslim sendiri. Jika yang

berkembang di masyarakat adalah opini bahwa syariat Islam merupakan solusi, bahwa Islam rahmatan lil alamin karenanya umat non-Muslim tak perlu cemas karena mereka dilindungi hak-haknya, maka mainstream yang muncul pastilah dukungan terhadap syariat Islam.

Kekuatan wacana publik luar biasa besarnya, wacana yang ada di benak setiap orang menentukan sikap orang itu terhadap sesuatu. Wacana publik yang tercipta di masyarakat bisa menjadi sanksi sosial atau tekanan psikologis. Misalnya ketika sebuah kelompok Muslim dicitrakan media sebagai teroris, sehingga menjadi wacana publik, maka pembelaan apapun dari kelompok itu akan sulit menghapus sikap sinis massa terhadap kelompok tersebut. Dan wacana publik ini bisa direncanakan (Romli, 2003:29).

Dalam konteks memenangkan wacana publik ini, pertanyaan yang sering muncul ialah; haruskah lembaga dakwah punya media? Inilah perdebatan yang sering muncul dikalangan para aktifis dakwah setiap kali diskursus tentang memenangkan wacana publik mengemuka. Dalam hal ini Muhammad Anis Matta salah seorang yang percaya bahwa memenangkan wacana publik tidak selalu dapat disederhanakan hanya dengan memiliki media. Menurutnya, memenangkan wacana publik ialah seni tentang bagaimana mempengaruhi dan menyusun kerangka pemikiran masyarakat. Atas bagaimana membuat mereka berpikir dengan cara yang diinginkan, bagaimana membuat mereka mempersepsikan sesuatu dengan lensa yang dikenakan oleh dakwah kepadanya (Matta, 2010:37).

Menurut Muhammad Anis Matta, pikiran adalah referensi yang diperlukan masyarakat untuk memberikan arah, merasionalisaikan sikap dan tindakan, membantu menentukan pilihan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan solusi. Tatkala Uni Soviet runtuh diawal dekade 90-an, orang-orang Barat menyatakannya sebagai kemenangan kapitalisme dan ekonomi pasar. Bagi mereka komunisme tidak lagi sanggup menjawab tantangan zaman yang dihadapi masyarakat. Komunisme mengalami kemarau dan kekeringan yang tidak kunjung selesai manakala negara yang menyangga kemudian kehabisan nafas untuk tetap bertahan (Matta, 2010:38).

Belajar dari realitas di atas Muhammad Anis Matta memandang ada beberapa syarat yang harus dimiliki umat Islam dalam memenangkan wacana publik: Pertama, ialah kekayaan pikiran (*ide*). Dan ini ditentukan oleh dua hal yaitu; (1). Kekayaan dan orisionalitas referensi. (2). Kemampuan mengeksplorasi referensi dan memformulasikannya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Menurutnya umat Islam memiliki kekayaan dan orisionalitas referensi, namun harus berlatih dan berusaha dengan keras untuk memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya dan menerapkannya sesuai tuntutan zaman . Dalam artian umat Islam mempunyai al-Qur'an dan Sunnah, namun diperlukan ijtihad untuk “menemukan mutiara-mutiaranya” Terutama ketika ingin mengimplementasikannya dalam konteks moderintas (Matta, 2010:38).



Syarat yang kedua, struktur pemikiran yang sudah dimiliki itu harus kuat dan solid. Kesolidan terbentuk ketika mencakup semua bagian yang inheren dalamnya dan pada waktu yang sama mempunyai daya tahan terhadap kritik dari luar. Sebuah pemikiran dengan struktur yang solid akan berpengaruh pada tiga hal; (1). Pada tingkat kejelasan pikiran dalam benak kita dan pada keseluruhan kesadaran kita. (2). Pada tingkat keyakinan terhadap pemikiran tersebut yang biasanya selalu tinggi. (3). Pada kemampuan membahasakannya atau pada daya ungkap yang tercipta dari kejelasan pikiran tersebut. Semakin jelas pemahaman seseorang terhadap suatu ide, semakin sempurna kemampuannya untuk membahasakannya (Matta, 2010:38).

Syarat ketiga, adalah kemampuan untuk meyakinkan publik. Kemampuan ini sekarang telah berkembang menjadi sebuah pengetahuan baru yang dalam hal ini orang-orang tidak lagi mempertanyakan kebenaran dari sebuah pikiran, tetapi berpikir bagaimana kemampuannya sebagai milik publik. Syarat ini bertumpu pada beberapa hal; (1). Pada penguasaan teoritis terhadap pikiran yang ingin disosialisasikan. (2). Pada penguasaan tentang struktur pemikiran orang lain dan varian-varian yang membentuknya. (3). Pada kejelian dalam menentukan entry point yang tepat untuk melakukan penetrasi terhadap pemikiran orang lain. (4). Pada kemampuan untuk menemukan format bahasa yang tepat dengan struktur kesadaran, bentuk logika, kecenderungan estetika kebahasaan, dan situasi

psikologis, serta momentum yang mengkorelasi pikiran dengan suasana mereka (Matta, 2010:39).

Namun demikian Muhammad Anis Matta tetap mengakui bahwa dalam memenangkan wacana publik menuntut umat Islam untuk memiliki media. Keberadaan media dalam rangka memenangkan wacana publik untuk kepentingan apapun sebenarnya sangat diperlukan termasuk ketika ingin melakukan penetrasi dakwah melalui politik. Yang demikian karena faktanya dalam dunia politik juga ditandai dengan keterlibatan media dalam hiruk-pikuknya. Media dalam hal ini diartikan secara luas, yaitu berbagai sarana yang terkait dengan penyampaian pesan, baik yang riil maupun simbolik, dari institusi politik kepada masyarakat yang lebih luas. Media dalam hal ini dapat berupa TV, radio, majalah ataupun koran (Firmanzah, 2011:28).

Selain dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menyampaikan ide, pesan dan program secara luas dengan biaya yang murah, media juga mampu membentuk wacana publik. Namun sayangnya pada era informasi ini arus informasi justru dikuasai oleh kaum non-Muslim yang memandang Islam sebagai musuh yang harus dihancurkan. Mereka melakukan semacam penjajahan informasi dan penjajahan media massa. Sedangkan umat Islam tidak memiliki media yang cukup memadai untuk menegakkan nilai-nilai Islam atau membela kepentingan agama Islam (Romli, 2003:14).

Bagi Muhammad Anis Matta memiliki media apa saja tetap tidak akan pernah cukup untuk melakukan peran itu. Menurutnya yang jauh lebih penting ialah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya; Kuasailah kerangka pemikiran Islam, pelajari cara orang lain berpikir, tentukan pintu masuk ke dalam akal pikiran mereka, pilihlah format bahasa yang sesuai dengan situasi mereka, dan berbicaralah pada saat yang tepat. Lebih lanjut, menurutnya menjadi issue maker mungkin lebih strategis ketimbang sekedar memiliki media. Namun memiliki keduanya tentu lebih sempurna (Matta, 2010:40).

## **2. Melakukan Legislasi**

Menurut Muhammad Anis Matta (2010), Setelah berhasil memenangkan wacana publik langkah berikutnya yang perlu dilakukan dakwah ialah memformulasikan wacana itu ke dalam draft hukum untuk dimenangkan dalam wacana legislasi melalui lembaga legislatif. Inilah yang melandasi Muhammad Anis Matta dan partainya (PKS) untuk mengembangkan dakwah mengikuti mekanisme demokrasi yang ada dengan melibatkan diri dalam parlemen. Dalam hal ini ia mengatakan.

“Dalam konteks itu (dakwah) demokrasi memberi kita ruang untuk mengatur kehidupan publik melalui prosedur-prosedurnya, salah satunya ialah melalui prosedur legislasi. Karena itu prosedur itu harus kita lalui. Kita harus berjuang ke situ itu, karena apa? Dalam negara demokrasi legislasi itu adalah panggung yang terbuka yang bisa diisi siapa saja. Sekali lagi situasi yang paling penting yang sangat kita butuhkan dalam melakukan dakwah ialah kebebasan. Karena kebebasanlah yang memberikan kita ruang gerak yang tidak terbatas dalam menyampaikan dakwah. Bahwa nanti orang mau beriman atau tidak, itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita hanyalah menghilangkan halangan-

halangan yang membuat pesan agama sampai kepada mereka” (Wawancara dengan Muhammad Anis Matta 14 Desember 2014).

Langkah untuk melakukan legislasi ini ditempuh karena dalam pandangan Muhammad Anis Matta, perjalanan gerakan dakwah Jamaah Tarbiyah (yang sekarang telah bertransformasi menjadi PKS) yang digelutinya kini telah memasuki *mihwar muasasi* (tahapan institusionalisasi). Dalam tahapan ini, yang dilakukan ialah melakukan mobilitas vertikal untuk menginstitusikan dakwah dalam negara. Kepemimpinan dakwah mengalami pengembangan tugas, dari pengelola gerakan kepada pengelolaan negara. Hal ini menindaklanjuti penyebaran horisontal dalam bentuk penetrasi sosial yang melahirkan fenomena Islamisasi dan membentuk komunitas-komunitas muslim telah relatif meluas dan memungkinkan untuk berkembang menjadi arus tuntutan publik yang kuat (Matta, 2010:47).

Yang terjadi dalam tahapan ini adalah sebuah transformasi strategis dari gerakan ke negara. Pada tahapan ini dakwah mulai mulai menegara, hal ini terjadi dengan dukungan sejumlah kekuatan strategis, berupa basis kepemimpinan, basis sosial, basis wilayah dan basis konseptual. Akan tetapi dalam proses bernegara, kekuatan strategis ini belum cukup untuk menjadikan Islam dan kaum muslimin sebagai pengelola utama negara. kekuatan strategis di atas merupakan kekuatan kualitatif yang tidak dapat berdiri sendiri (Matta, 2010:48), dan karenanya, harus mendapat pembobotan dari kekuatan strategis yang lain:

Beberapa kekuatan strategis tersebut antara lain: Pertama, kekuatan kuantitatif. Dalam masyarakat demokrasi, kekuatan kualitatif sebuah kelompok harus dapat dibuktikan secara kuantitatif. Hal ini disebabkan metode pengukuran kuantitatif menjadi niscaya dalam masyarakat yang besar dan heterogen, sehingga proses representasi harus dilakukan melalui penyederhanaan yang bersifat kuantitatif (Matta, 2010:48).

Pengukuran kuantitatif dalam sistem demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Dalam kondisi ini yang menang bukanlah partai yang terbaik tetapi partai terbesar. Oleh karena itu, faktor jumlah menjadi salah satu kekuatan strategis yang tak dapat diabaikan. Kenyataan ini mengharuskan jamaah mengaitkan aktifitas-aktifitas dakwah dengan rencana pemenangan pemilu (Matta, 2010:49).

Kedua, koneksi politik. Dalam dunia politik, yang dibutuhkan bukan hanya pengikut (konstituen), tetapi juga kawan. Inilah seni yang paling rumit dalam dunia politik; bagaimana mengubah kekuatan penghambat menjadi kekuatan pendukung, dan bagaimana mengubah lawan menjadi kawan. Konstituen memberikan dukungan vertikal, tetapi kawan-kawan politik memberi dukungan horisontal. Seribu kawan dalam politik tidaklah cukup, tetapi satu musuh sudah terlalu banyak (Matta, 2010:49).

Ancaman yang paling berat dalam dunia politik adalah isolasi. Walaupun jamaah tidak boleh takut terhadap isolasi, namun secara faktual

harus dipercayai bahwa itu akan sangat menghambat laju dakwah. Karena itu seni berkawan dan seni berkoalisi, bukan hanya menuntut kemampuan mengartikulasi diri dan nilai-nilai kita secara baik dan mempesona, melainkan juga menuntut kemampuan memahami orang lain, memasuki ruang akal dan hati mereka, mengelola perbedaan-perbedaan menjadi kekuatan dinamis, dan mengantisipasi potensi ancaman untuk tidak terkristalisasi menjadi kekuatan destruktif (Matta, 2010:50).

Sedangkan untuk mencapai kekuatan kuantitatif dan koneksi politik secara optimal maka diperlukan dua paradigma dalam dakwah. Kedua paradigma inilah yang akan memberikan arahan tentang bagaimana membangun kedua kekuatan tersebut (Matta, 2010:50).

Pertama, paradigma keterbukaan. Prinsip dasar dakwah adalah keterbukaan untuk semua manusia, baik muslim maupun non muslim. Hal ini disebabkan inti dari ajakan kepada mereka adalah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena itu, jamaah harus membuka diri untuk bergaul dengan siapa saja dengan tetap menjaga ciri khas jamaah. Selain itu harus dikembangkan sikap lebih wajar terhadap perbedaan-perbedaan identitas, kultur, pikiran, dan juga nilai-nilai (Matta, 2010:50).

Kedua, paradigma objek dakwah. Paradigma kedua ini adalah penajaman terhadap paradigma pertama. Hal ini dikarenakan dakwah ini untuk semua manusia, maka, maka kita harus memandang semua manusia

sebagai objek dakwah. Inilah inti keunggulan jamaah, yang sekaligus menuntut jamaah bekerja lebih cerdas dan memahami dengan baik. Bukan saja bagaimana berbaur sekalipun berbeda, tetapi bagaimana mempengaruhi, merekrut, mengelola, mengayomi, melindungi dan memimpin orang lain. (Matta, 2010:51).

Yang pertama mengharuskan jamaah membuka diri bagi semua orang; biar jamaah belajar menjadi karpet empuk yang diduduki oleh semua orang. Adapun yang kedua mengharuskan jamaah meningkatkan kemampuan mempengaruhi, mengorganisasi, dan memimpin orang lain. Yang pertama terkait dengan wawasan dan karakter, sedangkan yang kedua terkait dengan kemampuan. Jadi, persoalannya bukan pada terbuka atau tidak terbuka, sektarian atau tidak sektarian, tetapi bagaimana mendapatkan keuntungan optimal dari keterbukaan tersebut untuk kepentingan dakwah (Matta, 2010:51).

Pada akhirnya, hal ini akan menempatkan para pengurus dan kader berada dalam lingkaran struktural, simpatisan dan pendukung berada dalam lingkaran kultural, dan koneksi politik berada dalam lingkaran pengaruh jamaah. Kader pemimpin yang kompeten, konstituen yang banyak, koneksi politik yang luas, dan sekelompok pemikir strategi yang handal; itulah segenap kekuatan yang diperlukan untuk menegara.

### **3. Menjamin Terlaksananya Produk Hukum yang Telah Dilegisasikan**

Menurut Muhammad Anis Matta, setelah proses pelegislasian berhasil dilaksanakan, maka langkah selanjutnya setelah ialah memastikan eksekutif pemerintahan melaksanakan dan menerapkan hukum tersebut. Jadi itulah tiga pusat kekuasaan dalam negara demokrasi yang harus dikuasai oleh dakwah; wacana publik, legislasi dan eksekusi. Namun melakukan penetrasi ke dalam tiga pusat kekuasaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah (Matta, 2010:34).

Ketika ingin mengatasi pornografi misalnya, menurut Muhammad Anis Matta yang harus dilakukan dakwah ialah dengan menyusun struktur gagasan yang kuat untuk meyakinkan kepada publik, betapa merugikannya bagi kehidupan kita. Jika dakwah menang di sini, maka bisa dilanjutkan dengan membuat sebuah rancangan undang-undang untuk membasmi segala bentuk pornografi. Kalau dalam tahapan ini dakwah menang, langkah selanjutnya ialah mengontrol secara ketat apakah pemerintah melaksanakan secara baik atau tidak. Kalau pemerintah tidak melaksanakan dengan baik maka aktifitas dakwah bisa menuntutnya (Matta, 2010:35). Hal yang demikian bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dakwah yang lain. Namun semua itu bisa dilakukan kalau dakwah bisa memanfaatkan secara maksimal fitur-fitur yang ada dalam demokrasi.

Dalam konteks sistem politik Indonesia saat ini, menjamin terlaksananya kebijakan yang menguntungkan dakwah bisa dilakukan



melalui lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam legislatif bisa dilakukan melalui fungsi pengawasan yang terdapat dalam lembaga tersebut. Sedangkan dari sisi eksekutif bisa dilakukan dengan menempatkan kader-kader dakwah dalam lembaga-lembaga eksekutif diberbagai tingkatan dari pusat sampai daerah. Maka tidak mengherankan, kalau dalam organisasi yang dipimpinnya (PKS) para kader dakwah didorong untuk masuk dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam hal ini ada keterkaitan antara strategi dakwah yang ia pikirkan dengan organisasi yang dipimpin olehnya.

Kader-kader dakwah PKS yang telah lahir dan dikenal dalam blantika politik Indonesia cukup banyak, diantaranya; Nur Mahmudi Ismail (mantan menteri Kehutanan dan sekarang Walikota Depok), Hidayat Nurwahid (mantan Ketua MPR dan kini menjadi Wakil Ketua MPR), Tifatul Sembiring (mantan Menkominfo), Gatot Pudjo Nugroho (Plt. Gubernur Sumatera Utara), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat), Sa'aduddin (Bupati Bekasi), Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR), Andi rahmat, Mahfudz Sidiq, Nasir Djamil, Mustafa Kamal, Yoyoh Yusroh, Nursanita Nasution, Ledy Hanifa, Muhammas Anis Matta dan tokoh lainnya (Qodir: 2013: 174).

Menurut Muhammad Anis Matta (Matta, 2006:2), langkah-langkah dakwah dalam konteks demokratisasi dengan ikut mengelola negara sebagaimana telah diuraikan, secara historis mendapat afirmasi dari sejarah Islam. Dalam pandangannya peristiwa hijrah dalam sejarah

dakwah Rasulullah merupakan metamorfosis dari sebuah “gerakan” dakwah menjadi “negara”. Hal ini didahului penetrasi sosial yang sistematis selama tiga belas tahun, dimana Islam mejadi jalan hidup individu, menjadi aktivitas yang “memanusia” sekaligus “memasyarakat”. Setelah itu melalui hijrah, masyarakat bergerak linear menuju Negara.

Kalau individu membutuhkan akidah, maka negara membutuhkan perangkat sistem. Setelah komunitas Islam menegara, dan mereka menjadikan Madinah sebagai wilayahnya, Allah swt. menurunkan perangkat sistem yang mereka butuhkan. Maka turunlah ayat-ayat hukum dan berbagai kode etik sosial, ekonomi, politik, keamanan dan lain-lain. Dengan begitu lengkaplah susunan kandungan sebuah negara: manusia, tanah dan sistem.

Apa yang kemudian dilakukan rasulullah saw. sebenarnya relatif mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin politik yang baru mendirikan negara. Pertama, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. Kedua, menciptakan kohesi sosial melalui persaudaraan antar komunitas darah yang berbeda tapi menyatu sebagai komunitas agama, antara sebagian komunitas “Quraisy” dan “Yatsrib” menjadi komunitas “Muhajirin” dan “Anshar”. Ketiga membuat nota kesepakatan untuk bisa hidup bersama komunitas lain yang berbeda, sebagai sebuah masyarakat pluralistik yang mendiami wilayah yang sama, melalui Piagam Madinah. Keempat, merancang sistem pertahanan negara melalui konsep jihad fi sabilillah (Matta, 2006:2).

Lima tahun pertama setelah hijrah rasulullah dan para sahabat disibukkan dengan kerja keras mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup negara madinah. Dalam kurun waktu itu rasulullah melakukan peperangan lebih dari 40 kali dalam berbagai skala. Setelah negara Madinah relatif kuat dan teruji kemandiriannya, maka perang-perang berikutnya lebih bersifat ekspansif (Matta, 2006:2).

Dengan pembacaan sejarah dakwah rasulullah dengan cara demikian, Muhammad Anis Matta mengungkapkan bahwa pada tahapan ini bisa dikatakan yang dilakukan rasulullah adalah menegakkan negara. Sebagai sebuah bangunan, negara membutuhkan dua bangunan dasar, yaitu manusia dan sistem. Manusalah yang mengisi suprastruktur. Sedangkan sistem adalah perangkat lunak yang dengan itu sebuah negara bekerja. Selain kedua bahan dasar negara itu menurutnya yang dibutuhkan untuk tegaknya sebuah negara juga diperlukan bahan lain yaitu; tanah (wilayah) dan jaringan sosial (Matta, 2006:3).

Begitulah transformasi itu terjadi. Ketika gerakan dakwah menemui kematangannya, ia menjelma menjadi negara; ketika semua persyaratan dari sebuah negara kuat terpenuhi, negara itu tegak diatas bumi, tidak peduli dibelahan mana ia tegak. Proses transformasi ini memang terjadi dengan sangat cepat dan dalam skala yang sangat besar. Tapi proses ini mengajari umat dua hakikat besar; pertama, tentang hakikat dan tujuan dakwah serta strategi perubahan sosial. Kedua, tentang hakikat negara dan fungsinya.

Menurut Muhammad Anis Matta, tujuan dakwah ialah meneghewantahkan kehendak-kehendak Allah SWT. (agama/syariah) dalam kehidupan manusia. Syariah sendiri sesungguhnya merupakan sistem kehidupan yang integral, sempurna dan universal. Karena manusia yang akan melaksanakan dan mengoprasikan sistem tersebut maka manusia harus disiapkan untuk peran itu. Secara struktural, unit terkecil yang ada dalam masyarakat adalah individu. Itulah sebabnya perubahan sosial harus dimulai dari sana; membangun ulang susunan kepribadian individu, mulai cara berfikir hingga cara berperilaku. Setelah itu individu-individu itu harus dihubungkan satu sama lain dalam suatu sistem jaringan yang baru, identitas kolektif yang baru, sistem distribusi sosial, ekonomi, politik yang juga baru (Matta, 2006:4).

Nampaknya apa yang disampaikan Muhammad Anis Matta ini dekat dengan definisi dakwah yang disampaikan oleh Romli dalam *Jurnalistik Dakwah* (2003). Ia mendefinisikan dakwah sebagai upaya terus menerus untuk melakukan perubahan pada diri manusia menyangkut pikiran (fikrah), perasaan (syu'ur) dan tingkah laku (suluk) yang membawa mereka ke jalan Allah (Islam), sehingga terbentuk masyarakat Islami (al-Mujtama' al-Islami). Dalam pengertian hal ini ada hal penting dalam dakwah, yaitu; membentuk kepribadian muslim dalam rangka membentuk masyarakat yang Islami.

Demikian pula bagaimana Rasulullah saw. memulai dakwahnya. Beliau melakukan penetrasi ke dalam masyarakat Quraisy dan merekrut

orang-orang terbaik diantara mereka. menjelang hijrah ke Madinah, beliau juga merekrut orang terbaik dari penduduk Madinah. Maka terbentuklah komunitas baru dimana Islam menjadi basis identitas mereka, akidah menjadi dasar ikatan kebersamaan mereka, ukhuwah menjadi sistem jaringan mereka, dan keadilan menjadi prinsip sistem distribusi sosial-ekonomi-politik mereka. Tapi perubahan itu bermula dari sana; dari dalam individu, dari dalam pikiran, jiwa dan raganya (Matta, 2006:4).

Model perubahan sosial seperti itu mempunyai landasan pada sifat natural manusia. Baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Perubahan mendasar akan terjadi dalam individu jika ada perubahan mendasar pada pola pikirnya, karena pikiran adalah akar dari perilaku. Masyarakat juga begitu. Ia akan berubah secara mendasar jika individu-individu dalam masyarakat itu berubah dalam jumlah yang relatif memadai. Tapi model perubahan ini selalu gradual dan bertahap. Prosesnya lebih cenderung evolusioner, tapi dampaknya selalu bersifat revolusioner (Matta, 2006:5).

Menurut Muhammad Anis Matta, dalam konsep politik Islam, syariat atau yang kemudian ia sebut sebagai sistem atau hukum, adalah sesuatu yang sudah ada (given). Sedangkan negara adalah institusi yang diperlukan untuk menerapkan sistem tersebut. Inilah yang perbedaan yang mendasar dengan negara sekuler, dimana sistem atau hukum mereka adalah produk kesepakatan bersama karena hal tersebut sebelumnya dianggap tidak ada. (Matta, 2006:5).

Menurutnya, sebagai sebuah institusi bentuk negara selalu berubah mengikuti perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat manusia. Dari bentuk negara kerajaan, parlementer, hingga presidensial. Skala negara juga berubah mengikuti perubahan struktur kekuatan antar negara, dari imperium besar ke negara bangsa (nation state). Oleh karena semua ini merupakan variabel yang terus berubah, dinamis dan tidak statis, maka Islam tidak membuat batasan tertentu tentang negara. Bentuk boleh berubah, tapi fungsinya tetap sama; institusi yang mewadahi penerapan syariat Allah. Itulah sebabnya bentuk negara dan pemerintahan dalam sejarah Islam telah mengalami berbagai perubahan. Dari sistem khilafah ke kerajaan dan sekarang berbentuk negara bangsa dengan sistem yang beragam dari monarki, presidensial dan parlementer. Walaupun tentu saja ada bentuk yang lebih efektif menjalankan peran dan fungsi tersebut, yaitu sistem khilafah yang sebenarnya lebih mirip dengan konsep global state. Tapi juga harus diakui, efektifitasnya tidaklah semata-mata ditentukan oleh bentuk dan sistem pemerintahannya, tetapi terutama ditentukan oleh suprastrukturnya, yakni manusia (Matta, 2006:5).

Namun demikian, menurut Muhammad Anis Matta, merupakan kesalahan besar kalau menyederhanakan negara Islam dengan membatasinya hanya dengan pelaksanaan hukum pidana dan perdata, serta etika sosial politik lainnya. Persepsi ini yang membuat gambaran negara Islam lebih berciri moral ketimbang ciri lainnya. Menurutnya, yang perlu ditegaskan adalah bahwa syariat Allah itu bertujuan memberikan

kebahagiaan kepada manusia secara sempurna; tujuan hidup yang jelas, yaitu ibadah untuk mendapat ridha Allah Swt. Rasa aman dan kesejahteraan hidup. Hukum-hukum Islam dalam bidang pidana dan perdata sebenarnya adalah sub-sistem. Tapi dampak penerapan syariah tersebut pada penciptaan keamanan dan kesejahteraan hanya dapat muncul di bawah pemerintahan yang kuat (Matta:2006:6).

Dari keseluruhan strategi dakwah dalam konteks demokratisasi di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan, terlihat bahwa yang diperjuangkan Muhammad Anis Matta bukanlah substansi demokrasi itu sendiri. Ia kurang banyak menyinggung isu-isu penting dalam demokrasi seperti; Hak Asasi Manusia (HAM), isu-isu gender, hak-hak kaum marginal, dan lain sebagainya. Yang banyak ia bicarakan dalam hal ini ialah dakwah melalui sektor politik, padahal hanya instrumen dalam dakwah. Dari sini bisa dilihat, yang lebih banyak dilakukan olehnya ialah memanfaatkan longgarnya ruang demokrasi sebagai sarana untuk memperjuangkan tujuan dakwah yang ia pikirkan. Dalam hal ini demokrasi dijadikan semacam target antara untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Karena itu tidak mengherankan banyak pihak yang khawatir dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Bisa jadi demokrasi akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Menurut Syamsudin Haris (2014:xi), sistem demokrasi yang diraih pasca rezim Orde Baru semestinya menjadi arena bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kedaulatan mereka dalam kehidupan politik dan

ekonomi. Namun alih-alih berdaulat, usai pemilu proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan oligarkis yang berselubung partai politik, etnik, daerah agama dan golongan. Berbagai kekuatan oligarkis inilah yang akhirnya membajak dan menikmati demokrasi.

Lebih lanjut Haris menuturkan, pengalaman praktik demokrasi pasca rezim otoriter Orde Baru memperlihatkan tidak adanya upaya yang serius partai-partai politik dan para elite penyelenggara negara melembagakan demokrasi yang berkepemimpinan. Parpol yang menjadi agen utama demokrasi hanya melahirkan para politikus yang siap berkuasa dan memperkaya diri, tapi tanpa visi, moralitas dan tanggungjawab kepemimpinan. Akibatnya demokrasi formal memang terbentuk, tetapi secara substansial demokrasi tidak tercapai. Singkatnya, politik atas dasar kepentingan sempit dan jangka pendek mendominasi interaksi, kerjasama dan persaingan para elit politik yang dihasilkan pemilu.

Dalam dakwah melalui pendekatan politik memanfaatkan demokratisasi, yang perlu diperhatikan ialah jangan sampai ada anggapan bahwa kemenangan diukur dari seberapa banyak jabatan dan kekuasaan bisa diraih dan dikuasai. Bukan pula seberapa banyak kader dakwah yang bisa duduk di DPR maupun DPRD. Akan tetapi hakikat keberhasilan dakwah ialah ketika keberpihakan terhadap nilai-nilai Islam telah terlaksana. Walaupun secara kasat mata belum banyak kekuasaan yang bisa diraih. Namun akan lebih baik, ketika para da'i yang juga politis



ini mendapatkan jabatan dengan cara-cara yang baik dan benar, maka itulah sejatinya hakikat kemenangan (Qodir, 2013:194).